

## Inovasi pelayanan publik berbasis website opensid

Amelia Putri<sup>1✉</sup>, Dadan Kurniansyah<sup>2</sup>, Evi Priyanti<sup>3</sup>

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

### Abstrak

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi ujung tombak dalam melaksanakan Sistem Informasi Desa. Keberadaan SID dapat memaksimalkan pelayanan publik di Desa. pelayanan publik merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sejak tahun 2019 Pemerintah Desa Kalibuaya mulai mengembangkan SID berbasis OpenSID. Tujuan diadakannya SID berbasis OpenSID adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tata kelola Pemerintahan Desa yang semula masih dinilai lamban dengan proses manual. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana elemen sukses pengembangan *e-government* diterapkan dalam pengelolaan SID berbasis OpenSID di Desa Kalibuaya yang dilihat dari tiga elemen sukses pengembangan *e-government*. terdiri dari *Support*, *Capacity* dan *value*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara garis besar, hasil penelitian ini menunjukkan jika Desa Kalibuaya telah memiliki ketiga elemen tersebut dalam mengembangkan SID berbasis OpenSID. Hal ini dilihat dari elemen *support (political will)* yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kalibuaya.

**Kata Kunci:** Sistem informasi desa; pelayanan publik; desa kalibuaya

## Open-side website-based public service innovation

### Abstract

*Law No. 6 of 2014 concerning Villages is the spearhead in implementing the Village Information System. The existence of SID can maximize public services in the village. Public service is a need that must be met by the government. Since 2019 the Kalibuaya Village Government has begun to develop an OpenSID-based SID. The purpose of holding an OpenSID-based SID is none other than the village is to streamline and streamline village governance which was initially considered slow with a manual process. So this study aims to see the extent to which the elements of successful e-government development are applied in managing OpenSID-based SID in Kalibuaya Village which are seen from the three elements of successful e-government development, including Support, Capacity and value. This research uses a descriptive type of research with a qualitative approach. Broadly speaking, the results of this study indicate that Kalibuaya Village already has these three elements in developing an OpenSID-based SID. this can be seen from the element of strong support (political will) from the Kalibuaya Village Government.*

**Keywords:** Village information system; public service; kalibuaya village

Copyright © 2021 Amelia Putri, Dadan Kurniansyah, Evi Priyanti

✉ Corresponding Author

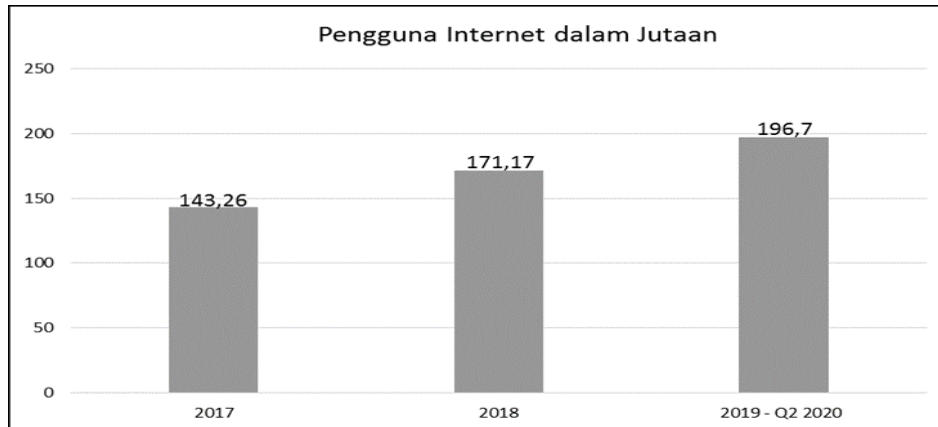
Email Address: ameliaputri0923@gmail.com

DOI: 10.29264/jmmn.v13i4.9885

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam masyarakat tidak dapat terbendung lagi, Teknologi seakan menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita dapat melihat lagi kebelakang, perkembangan teknologi saat itu belum seanggih sekarang, dan teknologi belum menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang berbagai aktivitas. Namun sekarang, dengan dukungan teknologi pekerjaan yang dirasa sulit dan berat untuk dikerjakan terasa lebih mudah.

Teknologi bukanlah apa-apa tanpa adanya dukungan internet didalamnya. Berikut merupakan angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dalam kurun waktu tiga setengah tahun:



**Gambar 1.**

Pertumbuhan pengguna internet

Berdasarkan Gambar 1. di atas dapat dijelaskan bahwa penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tercatat hingga pada kuartal kedua tahun 2020 mencapai 196,71 juta dari 266 juta penduduk Indonesia. Jumlah ini meningkat sebesar 73.7% dari tahun sebelumnya (Buletin APJII, 2020)

Melihat peningkatan jumlah pengguna teknologi dimasyarakat terus meningkat, maka pemerintah sebagai penyedia pelayanan harus bisa melihat dan memanfaatkan peluang yang ada agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang demikian dapat diwujudkan dengan adanya sebuah inovasi pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan yang berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam tata kelola pemerintahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dikenal dengan *Electronic Government*. Terdapat 2 makna penting yang tersirat dalam pengertian *e-government*. *Pertama*, penggunaan teknologi informasi seperti internet sebagai alat bantu. *kedua* adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Ketersediaan informasi yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, tentu akan membuat sistem pemerintahan lebih baik. (Yovita, 2016)

Penerapan sistem pemerintahan berbasis TIK dapat dikembangkan pada pemerintahan tingkat Pusat, Daerah hingga Desa. Semenjak ditetapkannya UU no 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki kewenangan besar untuk meningkatkan berbagai pembangunan. Karena esensi dari UU tersebut lebih menitikberatkan kepada Desa untuk tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus subjek pembangunan.

Pembangunan desa dalam hal ini dapat mencakup empat bidang, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa tersebut dapat ditopang dengan sistem informasi dan konsep *e – government*.

Penggunaan TIK dalam pemerintah desa akan memaksimalkan data tunggal yang lebih mudah untuk diupdate oleh aparatur desa dengan mengedepankan asas kesederhanaan. Sistem informasi desa

juga diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disebutkan dalam Pasal 86. Isi pasal tersebut meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta SDM. Kemudian isi pada SID meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Pedesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan.

Aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan SID dapat dikembalikan kepada kemampuan dan kewenangan setiap Desa. Seperti Desa Kalibuaya yang memilih platform OpenSID untuk mendukung fungsi dan tugas dari kantor desa, seperti administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan aset desa, pengelolaan anggaran serta layanan publik. Desa kalibuaya mengelola dan mengembangkan SID sejak tahun 2016. Namun sifatnya masih manual dan fungsinya masih terbatas, tidak variatif dan informatif seperti saat ini. Kemudian Pengembangan SID online berbasis OpenSID pada Desa Kalibuaya dimulai pada tahun 2019.

Akan tetapi, dalam pengembangannya masih terkendala beberapa hal seperti Kurangnya SDM yang memiliki keahlian TIK, kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, serta keterbatasan kemampuan literasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai sebuah terobosan terhadap kemudahan pelayanan. sehingga keberhasilan SID OpenSID ini belum dapat terlihat secara signifikan. Sementara menurut hasil kajian dari Harvard JFK School of Government, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh (Indrajit, 2016). Masing – masing elemen sukses tersebut adalah *support*, *capacity* dan *value*

*Support*, berbagai inisiatif pengembangan e – government tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur *political will*. Karena budaya birokrasi di Indonesia didasarkan pada manajemen *top – down*. Sehingga jelas bahwa untuk mendukung pelaksanaan program e – government yang efektif harus dimulai dari seorang pemimpin. Dukungan yang dimaksud bukan sekedar omongan melainkan dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk sebagai berikut:

Disepakatinya kerangka e – government sebagai salah satu kunci sukses dalam mencapai visi misi pemerintahan;

Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga dan waktu);

Dibangunnya infrastruktur dan suprastruktur pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan e – government; dan

Disosialisasikannya konsep e – government secara merata, kontinyu dan meneluruh kepada masyarakat.

*Capacity*, dalam mewujudkan impian e – government menjadi kenyataan, maka ada faktor kemampuan dan keberdayaan dari pemerintah yang harus dimiliki. Sehubungan dengan elemen ini terdapat tiga hal minimum yang harus dimiliki oleh pemerintah :

Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e– Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan

Ketersediaan sumber daya manusia, terutama yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan dalam menerapkan e – Government.

*Value*, Elemen pertama dan kedua di atas merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi layanan. Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut, dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian masalah dan teori diatas, fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat sudah sejauh mana Desa Kalibuaya menerapkan elemen sukses pengembangan e – government dalam inovasi pelayanan melalui SID berbasis OpenSID yang dianalisis menggunakan teori hasil riset dari Harvard JFK School Of Government.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2017) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian dilaksanakan di kantor Desa Kalibuaya dan di Desa Kalibuaya Kecamatan

Telagasari. informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa kalibuaya, serta beberapa masyarakat sebagai penerima layanan yang ada disekitar kantor Desa Kalibuaya. jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu : (1) Data Primer, data yang diperoleh langsung dari informan berupa kata-kata dan tindakan orang – orang yang diamati selama proses wawancara dan observasi berlangsung. (2) Data Sekunder, adalah data yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisis masalah penelitian. Data sekunder dapat berupa literatur, dokumen, laporan dan peraturan perundang – undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang gunakan adalah metode analisis kualitatif dengan model pendekatan Miles and Huberman. Model Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2020) meliputi : Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses inovasi dalam menciptakan pelayanan publik berkualitas di desa kalibuaya kecamatan telagasari**

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pemerintahan guna memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, bagi setiap warga Negara Republik Indonesia. Pemenuhan kebutuhan oleh penyelenggara pemerintahan meliputi pemenuhan atas barang, jasa atau pelayanan administratif. Paradigma pelayanan publik yang dinilai lamban menjadi tantangan bagi para penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas terhadap pelayanan publik kepada masyarakat. Berbagai inovasi dapat disusun agar cita – cita Negara untuk mewujudkan *good Governance* segera tercapai. Menurut (Hammer dan Champy, 1993) dalam (Nugraha, 2018) salah satu inovasi strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi adalah dengan melibatkan manfaat dari sistem informasi dan teknologi informasi terhadap proses yang ada dalam organisasi.

Penggunaan TIK dalam sistem pemerintahan dikenal dengan *Electronic Government*. Istilah *e-Government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi pada organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut lebih efektif dan transparan. Dengan *e-government* diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik. Kewajiban menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bukan semata – mata hanya tugas dari pemerintah daerah. Namun lebih jauh lagi, saat ini Pemerintah Desa sebagai unit terkecil dalam penyelenggara pemerintahan memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Terlebih semenjak ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan desa diberikan otonomi penuh terhadap penyelenggaraan berbagai pembangunan di Desa, termasuk menyediakan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Inovasi yang telah dilakukan oleh Desa Kalibuaya adalah pengembangan SID berbasis OpenSID. Proses inovasi yang dilakukan oleh Desa Kalibuaya dalam mewujudkan inovasi pada pelayanan publik melalui proses yang panjang. Dalam melaksanakan proses inovasi, tahapan yang dilakukan oleh Desa Kalibuaya adalah tahapan pengembangan inovasi meliputi proses pencarian kebutuhan dan masalah, riset dasar dan aplikatif, pengembangan dan komersialisasi. Tahapan terhadap proses pengembangan dapat terjadi secara terus menerus dan mengalami perkembangan. Karena merupakan suatu hal yang biasa dalam siklus inovasi yang tidak menatap pada kondisi yang stagnan, melainkan dinamis. Terlebih suatu inovasi yang dikembangkan berkaitan dengan TIK pasti akan membutuhkan pengembangan secara terus menerus sesuai dengan kondisi yang ada. Adapun alur yang proses inovasi pengembangan OpenSID Desa Kalibuaya dapat disajikan melalui diagram alur berikut ini:

### KEBUTUHAN DAN MASALAH

1. Kebutuhan
  - Agar bisa mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, seperti kebutuhan untuk membuat surat menyurat
2. Masalah
  - Proses pembuatan surat – menyurat sebelum diberlakukannya SID berbasis OpenSID memerlukan waktu yang lama.



### RISET DASAR DAN APLIKATIF

- Riset dasar dan Aplikatif yang dilakukan oleh Desa Kalibuaya adalah bergabung dengan Forum pengguna dan penggiat OpenSID seluruh Indonesia
- Kemudian setelah itu dapat mendownload web server menggunakan Xampp
- Kemudian dapat menjalankan Apache Web Server sebagai web server dan jalankan juga Mysql Database.
- Kemudian melakukan uji coba pada web server dengan mengetikkan “localhost”
- Kemudian langkah selanjutnya adalah menginstal OpenSID. dan akan muncul tampilan error.
- Untuk menghilangkan tampilan error pada browser harus mengimport database Desa terlebih dahulu
- Setelah database terimport semua maka akan muncul tampilan awal website OpenSID
- Kemudian langkah terakhir adalah menyesuaikan berbagai modul yang dibutuhkan dengan masuk pada halaman admin
- Kemudian admin dapat menyesuaikan fitur – fitur dan modul yang dibutuhkan dalam website OpenSID



### PENGEMBANGAN

Modul dari OpenSID serta yang telah dikembangkan oleh Desa Kalibuaya terhadap SID Berbasis OpenSID adalah sebagai berikut:

1. Siaga Covid – 19
2. Info desa
3. Kependudukan
4. Statistik
5. Sekretariat
6. Layanan surat
7. Analisis
8. Keuangan
9. Bantuan
10. Pertahanan
11. Pemetaan
12. Icalan Desa



### KOMERSILISASI

Penyebarluasan informasi dan pemanfaatan OpenSID kepada seluruh perangkat Desa Kalibuaya dan Masyarakat. dapat dilakukan secara *online* maupun

1. Sosialisasi secara *Offline*
  - Melalui rapat mingguan antar perangkat Desa
  - Secara langsung ke Masyarakat yang datang ke kantor Desa
2. Sosialisasi secara *online*
  - Melalui website itu sendiri
  - Melalui *youtube* Desa Kalibuaya
  - Melalui Facebook Desa Kalibuaya

Berdasarkan alur diagram yang telah di paparkan diatas, dapat diklasifikasikan sebagaimana pada penjelasan berikut ini.

*Pertama*, kebutuhan dan masalah menjadi dasar bagi setiap organisasi apabila hendak merumuskan sesuatu hal baru untuk menyelesaikan kebutuhan dan masalah. Desa Kalibuaya mengambil langkah dalam meyelesaikan kebutuhan dan masalah itu dengan membuat SID OpenSID. Langkah ini diambil oleh Desa Kalibuaya karena cara sebelumnya menghambat terhadap pelaksanaan proses pelayanan administrasi masyarakat. selain itu dengan SID OpenSID, Desa Kalibuaya dapat memenuhi asas transparansi dalam pelayanan.

*Kedua*, tahapan inovasi pada desa kalibuaya yang kedua adalah riset dasar dan aplikatif. tahapan yang dilakukan oleh desa kalibuaya adalah dengan melakukan berbagai pertimbangan terhadap aplikasi yang hendak digunakan dalam SID. Riset yang telah ditempuh oleh desa kalibuaya adalah dengan mencari berbagai informasi melalui media sosial *facebook*. kemudian Desa Kalibuaya menemukan grup penggiat SID seluruh indonesia. dan seterusnya dalam grup tersebut terjalin komunikasi antar penggiat SID yang memiliki visi misi yang sama untuk mengembangkan dan memajukan SID pada desa. dan kemudian Desa Kalibuaya mulai mengaplikasikannya sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah diberikan.

*Ketiga*, tahapan ketiga dalam inovasi sektor publik adalah pengembangan. Pengembangan adalah sebuah proses untuk meletakkan ide – ide baru kedalam bentuk yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini pemerintah Desa Kalibuaya melakukan pengembangan terhadap web tersebut dengan menambahkan berbagai fitur yang dibutuhkan oleh Desa dalam meningkatkan pelayanan publik. Pada umumnya dalam SID meliputi Informasi Desa, Data Kependudukan, Buku Administrasi Desa, data Statistik, dan Layanan Mandiri. Dalam proses pengembangan SID Desa Kalibuaya telah menambahkan fitur jual beli untuk memudahkan masyarakat yang memiliki bidang usaha agar dipasarkan dalam website desa. serta untuk meningkatkan perekonomian bagi Masyarakat Desa Kalibuaya ditengah kondisi yang tidak memungkinkan seperti sekarang ini.

*Keempat*, tahapan terakhir adalah komersialisasi. Komersialisasi dapat diartikan penyebarluasan atau sosialisasi terhadap inovasi yang telah dikembangkan oleh Desa. Tahap ini merupakan yang paling penting dan krusial harus dilaksanakan oleh *stakeholder* untuk memperkenalkan sebuah inovasi dan program yang hendak dijalankan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Desa Kalibuaya dilaksanakan secara langsung atau melalui beberapa media sosial seperti *Facebook*, *youtube* Desa Kalibuaya.

Berdasarkan uraian tahapan yang telah di deskripsikan diatas, kemudian di sinkronkan dengan tahapan pengembangan yang dilakukan oleh Desa Kalibuaya terhadap SID OpenSID, menunjukan bahwa urutan tahapan sudah sesuai dilaksanakan. Namun untuk melihat sudah sejauh mana penerapan SID OpenSID memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat akan dianalisis dengan menggunakan teori riset dari *Harvard JFK School of Government*. Dimana terdapat tiga elemen sukses terhadap pengembangan *e-government* yaitu *support*, *capacity* dan *value*.

### **Penerapan elemen *support* pada pengembangan sistem informasi desa opensid desa kalibuaya**

Elemen *support* (dukungan) dalam pengembangan *electronic government* diartikan sebagai dukungan. *Support* merupakan modal awal yang harus dimiliki oleh lembaga pemerintahan apabila hendak mengembangkan konsep *electonic government* dalam tata kelola pemerintahan. Elemen ini, dapat terpenuhi apabila adanya kesiapan dan kemauan dari seorang pemimpin yang memiliki *political*

will. Selain itu, dukungan juga dapat berasal dari masyarakat setempat, stakeholder terkait maupun pihak swasta sekalipun. Adapun bentuk dukungan dapat dilakukan dengan hal-hal berikut:

Disepakatinya kerangka *e – government*

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup masyarakat desa secara maksimal. Pembangunan Desa mencakup empat hal yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pembangunan desa yang difokuskan dalam lingkup pembangunan tersebut hendak menegaskan esensi dari UU Desa yang memberikan kewenangan yang besar kepada desa untuk tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Melainkan sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan.

Pembangunan di Desa dapat didukung oleh sistem informasi dalam konsep *e – government* yang dapat menjadi pertimbangan utama bagi organisasi sektor publik (pemerintah desa) dalam perencanaan sistem informasi untuk mempermudah proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di Desa. Keberadaan UU Desa tersebut menjadi ujung tombak diselenggarakannya SID pada Desa Kalibuaya. selain itu, Pemerintah Desa Kalibuaya juga telah memiliki kesepakatan bersama untuk menerapkan *e – government* dalam pelayanan publik. Sehingga pemahaman terhadap pemanfaatan *e – government* pada Desa Kalibuaya sudah cukup baik.

Dialokasikannya sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu informasi dan lain – lain).

Pengalokasian sumberdaya dalam hal ini difokuskan untuk memilih sumber daya manusia yang memiliki keahlian pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengalokasian SDM di Pemerintahan Desa Kalibuaya belum bisa dikatakan tepat sasaran jika dilihat dari latar belakang pendidikan admin dan operator OpenSID. sehingga untuk memaksimalkan pelayanan diperlukan adanya sebuah tim yang dibentuk secara khusus dalam pengelolaan SID OpenSID Desa Kalibuaya.

Dibangunnya berbagai infrastruktur dan suprastruktur agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e – Government*.

Menurut (Indrajit, 2016) ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Perangkat Hukum merupakan komponen pendukung yang harus terpenuhi apabila hendak mengembangkan konsep *e – Government* pada tataran pemerintahan. Dalam level pelaksana, perangkat keras yang harus dimiliki seperti komputer, jaringan internet yang memadai. Sementara payung hukum juga dibutuhkan untuk meminimalisir adanya pelanggaran hak cipta. Berikut merupakan tabel penggunaan sarana dan prasarana pendukung SID berbasis OpenSID yang diperlukan oleh Desa Kalibuaya Untung mengembangkan OpenSID

Dalam pemanfaatan SID OpenSID desa kalibuaya juga minimal dalam penggunaan maintenance, sehingga hal tersebut akan menghemat anggaran yang dikeluarkan. Pengelolaan maintenance dikelola sendiri oleh Sekertaris Desa Kalibuaya yang posisinya sebagai admin pada web Desa Kalibuaya

Disosialisasikannya konsep *e - Government* serara merata, kontinyu, konsisten

Pengembangan *e – Government* pada Desa Kalibuaya tidak terlepas dari adanya peran pemerintah yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga dengan begitu masyarakat dapat mengetahui adanya sebuah SID di Desa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan transparansi informasi. Sejauh ini, proses sosialisasi yang dilakukan oleh Desa Kalibuaya melalui youtube, *facebook*, serta disebarakan ketika ada rapat mingguan dalam *minggon*. Sosialisasi sangat penting dilakukan oleh pemerintah, Karena faktor elemen sukses penerapan *e – Government* juga dapat dipengaruhi oleh *local culture* atau budaya lokal. Sehingga, Hal ini dapat mempengaruhi kesuksesan yang dilihat dari kesiapan dan kemampuan masyarakat karena peran masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi *e – Government* (Eko Nugroho, 2008:168) dalam (Arif, 2013)

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap SID kurang antusias hal ini disebabkan kurang masifnya sosialisasi oleh Pemerintah Desa Kalibuaya serta keterbatasan literasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

### **Penerapan elemen *capacity* pada pengembangan sistem informasi desa opensid desa kalibuaya**

Menurut (Indrajit, 2016) elemen kedua yang harus dimiliki oleh sektor publik apabila hendak mengembangkan *e – Government* adalah *capacity*. Dalam mewujudkan impian *e – Government*,

pemerintah harus memiliki unsur kemampuan dan keberdayaan. Sehubungan dengan elemen ini, terdapat tiga hal minimum yang harus dimiliki oleh pemerintah agar impian *e – Government* dapat terwujud.

Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e– Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan

Ketersediaan sumber daya manusia, terutama yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan dalam menerapkan *e – Government*

Seyogyanya ketiga prasyarat itu harus dimiliki oleh pemerintah untuk menerapkan *e – Government*, namun apabila satu dari ketiga syarat itu tidak dapat terpenuhi bukan menjadi alasan untuk menunda penerapan *e – Government*. pemerintah harus bisa mencari cara yang efektif agar dalam waktu dekat dapat memenuhi ketiga prasyarat tersebut Seperti yang dilakukan oleh Desa Kalibuaya, berkat inisiatif dan kreatifitas yang dimiliki maka mereka dapat memenuhi infrastruktur yang mendukung terselenggaranya *e – Governemnt* di Desa Kalibuaya. Ketersediaan infrastruktur untuk menunjang SID OpenSID diperoleh sebagian dari anggaran Dana Desa dan juga ada beberapa yang berasal dari Komunitas Open Desa yang menanungi OpenSID.

Pada umumnya PPID Desa itu terdiri dari Sekertaris Desa, Kaur – Kaur, dan Kasi yang tergabung dalam struktur pemerintahan desa. akan tetapi untuk desa kalibuaya sendiri belum dibentuk secara khusus dan dalam peraturan yang tertulis. Sehingga, dengan begitu sering terjadi ketidakteraturan tugas dan wewenang dari setiap aparatur pemerintah.

Meskipun demikian, Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Kantor Desa Kalibuaya, menunjukkan jika sarana prasarana pengembangan SID OpenSID di Desa Kalibuaya saat ini masih terus dikembangkan. Mulai dari Sumber daya finansial, infrastruktur, dan SDM yang memadai.

### **Penerapan elemen *value* pada pengembangan sistem informasi desa opensid desa kalibuaya**

Menurut (Indrajit, 2016) elemen *value* ini berdasarkan pada manfaat yang diperoleh pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan *e – Government*. Kedua pihak ini harus sama – sama memili keuntungan atas ditetapkanya *e – Government* pada pelayanan.

Manfaat dibuatnya SID OpenSID bagi pemerintah Desa Kalibuaya adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kerap muncul seperti ketika pengelolaan data desa, proses adminstrasi data desa, pengelolaan data surat menyurat dan pengelolaan data penduduk. Selain itu, SID juga penting bagi desa untuk melakukan adanya transparansi informasi. Karena dengan SID OpenSID ini Pemerintah Desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga. Berikut hasil wawancara dengan Sekertaris Desa selaku admin pada OpenSID.

Selain melihat dari sisi pemerintah selaku penyedia pelayanan, untuk mengukur sudah sejauh mana aplikasi ini memberikan manfaat, maka akan lebih baik mengetahui SID OpenSID dari sisi masyarakat sebagai pengguna dan sasaran program ini

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, keberadaan SID OpenSID sangat membantu terhadap proses pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, peran pemerintah untuk mensosialisasikan adanya SID OpenSID ke masyarakat harus lebih di maksimalkan lagi agar seluruh masyarakat kalibuaya mengetahui secara merata dan bisa lebih memanfaatkan keberadaan dan fungsi dari SID OpenSID tersebut.

### **SIMPULAN**

Merujuk pada pembahasan dan serangkaian hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait faktor sukses penerapan *e – Government* pada SID OpenSID diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

*Support* atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah Desa Kalibuaya terhadap SID OpenSID sudah sangat baik. Hal ini ditunjukan dari perangkat desa terutama sekertaris desa yang banyak mengambil peran dalam penyelenggaraan SID berbasis OpenSID di Desa Kalibuaya. selain itu, dukungan juga semakin sempurna berkat Open Desa sebagai pengelola platform OpenSID yang terus memberikan dukungannya melalui pengajuan beberapa fitur yang dibutuhkan oleh Desa;



*Capacity* atau kapasitas yang dilihat dari ketersediaan Sumber daya finansial dan Sumber Daya Manusia untuk pengembangan OpenSID sudah cukup memenuhi. Namun belum dapat dimaksimalkan dengan kapasitas masing – masing SDM yang ada di Desa Kalibuaya; dan

*Value* atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap adanya SID OpenSID yaitu proses penyebarluasan informasi Desa menjadi lebih mudah dan terjalin transparansi data dan informasi kepada masyarakat. serta dapat mengefisienkan waktu dalam pembuatan surat menyurat bagi kelengkapan administrasi penduduk desa.

Secara umum SID OpenSID merupakan kebutuhan yang harus dimiliki oleh desa dalam mengelola data kependudukan yang jumlahnya ribuan, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi desa dan pengurusan surat menyurat untuk memenuhi kelengkapan administrasi penduduk. Namun, manfaatnya kurang begitu dirasakan oleh masyarakat karena keterbatasan literasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan.

Sehingga melihat kekurangan itu, maka pemerintah desa harus mengambil solusi yang lebih efisien agar manfaat SID OpenSID dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. adapun yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan sosialisasi sesering mungkin dan se menarik mungkin agar masyarakat memiliki minat yang tinggi atas apa yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. S. (2013). Analisis Pengembangan Electronic Government melalui Penyelenggaraan Website di Kabupaten Kudus. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v2i4.3521>
- Buletin APJII. (2020). *No Title*. APJII. <https://blog.apjii.or.id/index.php/2020/11/09/siaran-pers-pengguna-internet-indonesia-hampir-tembus-200-juta-di-2019-q2-2020/#:~:text=Secara umum%2C hasil survei APJII,9 juta berdasarkan data BPS.>
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Govenrnmnt*. ANDI OFFSET.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Revisi)*. PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Ketiga)*. Alfabeta.
- Yovita. (2016). *Implementasi Penerapan E-Government*. Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. [https://kominfo.go.id/content/detail/8554/implementasi-penerapan-e-government/0/sorotan\\_media#:~:text=Mulai dari urusan bisnis%2C serta,sistem pemerintahan secara lebih efisien.](https://kominfo.go.id/content/detail/8554/implementasi-penerapan-e-government/0/sorotan_media#:~:text=Mulai dari urusan bisnis%2C serta,sistem pemerintahan secara lebih efisien.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).